OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

(OPTIMIZATION OF CORRUPTION CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN YAPEN ISLANDS DISTRICT)

TESIS

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

OLEH

HERRY ARUNG BORO
NIM. 2022025015144

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Optimization Of Corruption Criminal Law Enforcement In Yapen Islands District

Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal : 2024

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Budiyanto, S.H.,M.H	**Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum**
NIP. 19660124 199303 1 001	**NIP. 19660302 199303 1 002**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Marthinus Mambaya,S.H.,M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji pada tanggal, ...Juni 2024

TIM PENGUJI

Dr. Budiyanto, S.H.,M.H NIP. 19660124 199303 1 001	Ketua	(.....)
Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum NIP. 19660302 199303 1 002	Sekretaris	(.....)
Dr. Farida Kaplele, S.H.,M.H NIP. 19830816 200604 2 004	Anggota	(.....)
Dr. Nur Asmarani, S.H.,M.H NIP. 19630913 199003 2 002	Anggota	(.....)
Dr. Basir Rohrohmana, S.H.,M.Hum NIP. 19641009 199003 1 003	Anggota	(.....)

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jayapura, 25 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,

Herry Arung Boro
NIM. 2022025015144

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang difokuskan pada Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Yapen, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut berwenang memberikan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi melalui penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa upaya mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan Yapen dipengaruhi oleh faktor substansi hukumnya (undang-undang), faktor struktur hukum (kinerja aparat penagak hukum), dan faktor budaya hukum masyarakat. Kendala-kendala yang dihadapai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan Yapen terdiri atas kendala hukumnya (undang-undang), yaitu ketentuan tentang perbuatan, kerugian negara, dan sanksi pinada khusus. Kendala faktor penegak hukum, yaitu masih rendahnya kualitas aparat penegak hukum, kurangnya komitmen dalam memberantas korupsi, kurangnya koordinasi, dan masih adanya praktek suap. Kendala faktor sarana dan prasarana, yaitu masih rendahnya kualitas aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi, dan penumpukan berkas perkara. Kendala faktor masyarakat, yaitu masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, dan rendahnya mental serta keimanan. Kendala faktor kebudayaan (budaya hukum), yaitu mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan budaya memberi dan menerima suap masyarakat dengan maksud untuk memudahkan birokrasi yang rumit dan sulit.

Disarankan kepada aparat penegak hukum agar lebih serius dan tegas dalam memberantas tindak pidaja korupsi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Penjatuhan sanksi pidana yang berat dan maksimal dapat memberikan efek jera, sehingga kasus korupsi dapat diminimalisir. Kepada masyarakat khususnya bagi pejabat pemegang kekuasaan agar menjadi contoh teladan dalam berperilaku jujur dan transparan sehingga tidak terjebak bujuk rayu dan godaan yang dapat menjerumuskan ke dalam praktik korupsi. Apabila mengetahui adanya indikasi terjadi praktik korupsi agar tidak segan dan takut melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Optimalisasi, Penegakan Hukum, Korupsi.

ABSTRACT

This research was conducted in Yapen Islands Regency and focused on the Yapen Islands Regency Police, the Yapen Islands Regency District Prosecutor's Office, and the Jayapura Class I A District Court Judge with the consideration that these institutions have the authority to provide a sense of justice for perpetrators of criminal acts of corruption through law enforcement in Yapen Islands Regency. . The type of research used is normative legal research and is supported by empirical legal research.

The research results show that efforts to optimize law enforcement against criminal acts of corruption in Yapen Islands Regency are influenced by legal substance factors (laws), legal structure factors (performance of law enforcement officers), and community legal culture factors. The obstacles faced in law enforcement against criminal acts of corruption in Yapen Islands Regency consist of legal obstacles (laws), namely provisions regarding acts, state losses, and special criminal sanctions. Constraints include law enforcement factors, namely the low quality of law enforcement officers, lack of commitment to eradicating corruption, lack of coordination, and the continued practice of bribery. Constraints include facilities and infrastructure, namely the low quality of law enforcement officers in dealing with corruption cases, and the accumulation of case files. Obstacles include community factors, namely low awareness and compliance with community laws, and low mental health and faith. Obstacles are cultural factors (legal culture), which include the values that underlie applicable laws, and the culture of giving and receiving bribes from the public with the aim of facilitating complicated and difficult bureaucracy.

It is recommended that law enforcement officials be more serious and firm in eradicating acts of corruption in Yapen Islands Regency. Imposing severe and maximum criminal sanctions can provide a deterrent effect, so that corruption cases can be minimized. To the public, especially to officials holding power, to be role models in behaving honestly and transparently so that they are not trapped by persuasion and temptations that can lead them into corrupt practices. If you know that there are indications of corrupt practices, don't be reluctant or afraid to report it to law enforcement officials.

Keywords: *Optimization, Law Enforcement, Corruption.*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

> Setiap tindakan anti korupsi adalah investasi untuk masa depan yang lebih adil.
>
> (Herry Arung Boro)

Tesis ini dengan tulus iklas kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda terkasih Julius Arung dan Josephina Sampe Kanan.
2. Istriku tercinta Linda Arung Bua, S.E. Anakku tersayang Dilan Adhyka Banne Datu.
3. Almamater Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Syukur dan kemuliaan hanya kehadirat Tuhan Maha Pengasih, berkat rahmat dan karuniaNya. sehingga Tesis ini dapat dirampungkan dengan baik dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulisan Tesis ini tidak terlepas dari berbagai dukungan serta bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini sepantasnya disampaikan terimah kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc., Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas segala kebijakannya sehingga penulis dapat menempuh studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya tesis ini.
4. Dr. Budiyanto, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih yang telah membekali penulis dengan ilmu hukum selama menempuh studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
6. Bapak dan Ibu Staf Administrasi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih atas segala pelayanan administrasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Kedua orang tuaku: Julius Arung dan Josephina Sampe Kanan, Istriku: Linda Arung Bua, S.E. Anakku: Dilan Adhyka Banne Datu, yang telah memberikan semangat dan doa nya sehingga terselesaikannya tesis ini.
8. Rekan se-angkatan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih, yang turut memberikan dorongan moril kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.
9. Seluruh pihak yang telah berturut serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala pengorbanan, dorongan dan bantuan tersebut mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kritik dan saran konstruktif senantiasa penulis terima demi perbaikan tesis ini.

Jayapura, 25 Juni 2024

Penulis,

Herry Arung Boro
NIM. 2022025015144

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
PELAKSANAAN UJIAN iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Metode Penelitian 6

BAB II LANDASAN TEORI
A. Teori Negara Hukum 9
B. Teori Penegakan Hukum 18
C. Teori Pemidanaan 26
D. Pengertian Tindak Pidana 34
E. Pengertian Korupsi 37
F. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi 46
G. Bagan Kerangka Pikir 57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Upaya Mengoptimalkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Kepulauan Yapen 58
B. Kendala-kendala Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Kepulauan Yapen 107

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 117
B. Saran 118

DAFTAR PUSTAKA 119